



## **BUPATI BULUNGAN**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 800.1.2.2/2403/BKPSDM-IV

### **TENTANG**

## **SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/530 Tahun 2024 tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan akan melaksanakan seleksi Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang akan mengisi jabatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **I. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah untuk pelamar jabatan fungsional kesehatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
3. Usia paling rendah untuk pelamar jabatan fungsional guru adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat melamar;
4. Usia paling rendah untuk pelamar jabatan fungsional Teknis adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
5. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
6. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

- anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
7. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
  10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah;
  13. Pelamar hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
  14. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran.
  15. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, pelamar dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  17. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
  18. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
  19. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
  20. Pelamar dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, apabila pelamar diketahui membantu dan/atau melakukan kecurangan, pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN, bentuk kecurangan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  21. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain yang ditandatangani di atas *e-materai* atau materai konvensional 10.000 oleh calon pelamar (sesuai *Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019*) sebanyak 1 (satu) rangkap (format Surat Pernyataan dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial Facebook BKPSDM : [Bkpsdm Bulungan](#))

## II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Setiap Pelamar wajib memiliki alamat email yang masih berlaku;
2. Surat lamaran ditandatangani ditujukan Kepada Bupati Bulungan (format surat lamaran dapat diunduh di <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial Facebook BKPSDM : [Bkpsdm Bulungan](#) dengan melampirkan:
  - a. Asli Ijazah dan transkrip nilai Perguruan Tinggi/STTB terakhir;

- b. Asli Ijazah dan transkrip nilai Perguruan Tinggi/STTB terakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Cetak asli bukti pendaftaran online;
  - d. Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Identitas Kependudukan Digital (IKD)/Surat Keterangan Sementara yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku.
3. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi, minimal 2.30 (dua koma tiga puluh) dibuktikan dengan transkrip nilai Perguruan Tinggi terakhir;
  4. Pelamar dengan penyandang disabilitas diwajibkan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya serta video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
  5. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *Insternship* sesuai jabatan yang dilamar serta masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
  6. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional Teknis wajib melampirkan persyaratan Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan Fungsional Teknis dapat melampirkan Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional guru yang mengisyaratkan persyaratan sertifikat pendidik (PPG) wajib melampirkan sertifikat pendidik (PPG);
  9. Dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebagaimana tersebut di atas diunggah (upload) pada SSCASN BKN;
  10. **Khusus untuk Formasi dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis :**

**KRITERIA PELAMAR**

- a. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan :
  - 1) Jabatan Fungsional;
  - 2) Jabatan Pelaksana.
- b. Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis pada Instansi Daerah Tahun 2024 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar, terdiri atas kategori:
  - 1) **Pelamar Eks Tenaga Honorer Kategori II**  
Eks Tenaga Honorer Kategori II merupakan Peserta yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan aktif bekerja pada instansi pemerintahan.

**2) Pelamar Tenaga Non ASN**

Kriteria Pelamar Tenaga non ASN :

- a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - b) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus.
- c. Setiap pelamar pada seleksi PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
  - 2) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan Ahli Pertama;
  - 3) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang Ahli Muda;
  - 4) Pengalaman sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- d. Setiap pelamar pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan Ahli Pertama;
  - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang Ahli Muda;
  - 3) Pengalaman sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh :
    - a) Kepala Puskesmas/Kepala UPTD bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas/UPTD Kesehatan;
    - b) Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
    - c) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
    - d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon II.
- d. Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis diberlakukan secara berurutan bagi :
- 1) Eks THK-II;
  - 2) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
  - 3) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus.
- e. Pelamar penyandang Disabilitas yang dapat mendaftar pada kebutuhan jabatan Fungsional Kesehatan dan jabatan fungsional Teknis meliputi :
- a. Tuna Daksa (Kaki);
  - b. Tuna Rungu;
  - c. Tuna Wicara.

11. **Khusus untuk Formasi dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru :**

**KRITERIA PELAMAR**

- a. Kriteria pelamar pada pengadaan pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2024 meliputi :
  - 1) Pelamar Prioritas;
  - 2) Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-2);
  - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di instansi daerah; atau
  - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- b. Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :
  - 1) Pelamar Prioritas;

Pelamar Prioritas merupakan peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.
  - 2) Guru Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-2);

Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data Eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah.
  - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di instansi daerah terdiri atas ;
    - a) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
    - b) Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.
  - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- c. Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), 2) dan 3) hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar pada saat pendaftaran.
- d. Pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, diisyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah Tahun Anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.
- e. Pelamar penyandang disabilitas RUNGU tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Bahasa Inggris Ahli Pertama;
- f. Pelamar penyandang disabilitas DAKSA tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan Ahli Pertama;

- g. Pelamar penyandang disabilitas NETRA tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama;
- h. Penentuan pelamar yang lulus seleksi PPPK JF Guru Tahun anggaran 2024 diberlakukan secara berurut bagi :
  - 1) Pelamar prioritas;
  - 2) Guru Eks THK-II;
  - 3) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah;
  - 4) Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus menerus di instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar;
  - 5) Lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024, melakukan pendaftaran secara *online* pada alamat website Portal SSCASN 2024 pada <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Pada saat pendaftaran secara online, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran online dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman pendaftaran online tersebut;
3. Pelamar Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Untuk melakukan pendaftaran secara *online*, calon pelamar Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024, wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon pelamar, Nomor Kartu Keluarga (KK), sesuai pada Kartu Keluarga (KK) calon pelamar;
5. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun calon peserta Seleksi pada Portal SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>) dilanjutkan dengan pendaftaran pada jenis jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman;
6. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan, apabila pelamar melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan dan/atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
8. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dalam mengisi formulir terdapat data yang tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat;
9. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) calon pelamar, silahkan menghubungi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

10. Pada halaman daftar pada tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan data Ijazah. Proses pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari : Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan mengisi data tersebut dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
11. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024. **Simpan Kartu tersebut dengan baik;**
12. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke <https://sscasn.bkn.go.id>, kemudian masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan PASSWORD yang telah didaftarkan, lalu tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
13. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran pada Instansi Daerah yang dituju;
14. Pilih jenis jabatan sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi Pemerintah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat pada Pengumuman;
15. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar pada Instansi Pemerintah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan;
16. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk dalam data base SSCASN 2024;
17. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **wajib** mengunggah semua berkas persyaratan yang telah ditentukan, dan mencetak **Tanda Bukti Pendaftaran online**;
18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
19. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdm Bulungan](https://www.instagram.com/bkpsdm_bulungan), dan <https://sscasn.bkn.go.id>

#### IV. PENYAMPAIAN BERKAS LAMARAN SECARA ONLINE

1. Pelamar mengunggah berkas/dokumen lamaran pada laman <http://sscasn.bkn.go.id>;
2. Berkas permohonan yang harus di UNGGAH pada saat pendaftaran :
  - a. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Scan Asli KTP/asli surat keterangan atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan instansi;
  - c. Scan Asli Ijazah sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri;
  - d. Scan Asli Transkrip nilai, atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan Teknologi;

- e. Scan Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain yang ditandatangani di atas *e-materai* atau materai konvensional 10.000 oleh calon pelamar (sesuai *Anak Lampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019*) sebanyak 1 (satu) rangkap (format Surat Pernyataan dapat diunduh di laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial Facebook BKPSDM : [Bkpsdm Bulungan](https://www.facebook.com/BkpsdmBulungan), dan <https://sscasn.bkn.go.id>).
  - f. Scan asli surat lamaran yang ditandatangani ditujukan Kepada Bupati Bulungan dan ditandatangani di atas *e-materai* atau materai konvensional;
  - g. Scan Asli Surat Keterangan Pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar pada instansi pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
  - h. Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bagi jabatan fungsional kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) dikeluarkan lembaga profesi yang berwenang dan masih berlaku pada saat pendaftaran;
  - i. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional teknis wajib melampirkan persyaratan tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan Fungsional Teknis dapat melampirkan Sertifikat Kompetensi sebagai tambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional guru yang mengisyaratkan persyaratan sertifikat pendidik (PPG) wajib melampirkan sertifikat pendidik (PPG);
3. Pelamar yang dinyatakan lulus atau tidak lulus seleksi berkas administrasi dapat dilihat pada portal SSCASN BKN dengan ketentuan :
- a. Jika dinyatakan lulus seleksi berkas, pelamar dapat mencetak kartu peserta tes melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN BKN.

## V. PELAKSANAAN UJIAN

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Peserta tes Seleksi Kompetensi wajib hadir 2 (dua) jam sebelum tes dilaksanakan untuk registrasi dengan membawa persyaratan :
  - a. **KTP asli;**
  - b. **Kartu Peserta Tes asli.**
3. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dan huruf b di atas, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
4. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat pada situs *online* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten



Bulungan pada laman <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](#);

5. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur**;
6. **Ketentuan Seleksi Kompetensi**
  - a. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT BKN yang diselenggarakan oleh BKN;
  - b. Seleksi Kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
  - c. Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh Instansi Pembina JF dan diintegrasikan kedalam bank soal CAT BKN;
  - d. Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas;
  - e. Pengisian kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Tenaga Teknis terdiri dari :
    - 1) Peserta pada kebutuhan PPPK JF Kesehatan dan Tenaga Teknis yang dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
    - 2) Pengisian Kebutuhan PPPK JF Kesehatan dan Tenaga Teknis diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta Eks THK-II yang berperingkat terbaik;
    - 3) Dalam hal masih terdapat kebutuhan PPPK JF Kesehatan dan Tenaga Teknis yang belum terpenuhi oleh pelamar Eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) non ASN pada BKN yang berperingkat terbaik;
    - 4) Dalam hal masih terdapat kebutuhan PPPK JF Kesehatan dan Tenaga Teknis yang belum terpenuhi oleh pelamar tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) non ASN pada BKN, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus yang berperingkat terbaik;
    - 5) Penentuan pelamar yang lulus seleksi pada kebutuhan PPPK JF Kesehatan dan Tenaga Teknis diberlakukan secara berurutan bagi :
      - a) Eks THK-II;
      - b) Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
      - c) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus.
    - 6) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada Instansi Daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda;
  - f. Pengisian jabatan Fungsional Guru terdiri dari :
    - 1) Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi kompetensi PPPK JF Guru Tahun 2021;

- 2) Peserta pada kebutuhan JF Guru yang dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar;
- 3) Pengisian Kebutuhan PPPK JF Guru diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta prioritas yang berperingkat terbaik;
- 4) Dalam hal masih terdapat kebutuhan PPPK JF Guru yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta Eks THK-II yang berperingkat terbaik;
- 5) Dalam hal masih terdapat kebutuhan PPPK JF Guru yang belum terpenuhi oleh pelamar Eks THK-II, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkatan data (database) non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, yang berperingkat terbaik;
- 6) Dalam hal masih terdapat kebutuhan PPPK JF Guru yang belum terpenuhi oleh pelamar tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkatan data (database) non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek yang aktif mengajar paling singkat 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar yang berperingkat terbaik;
- 7) Dalam hal masih terdapat kebutuhan PPPK JF Guru yang belum terpenuhi oleh pelamar guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek berperingkat terbaik;
- 8) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar pada pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

#### 7. Prinsip Penentu Kelulusan dan Masa Sanggah

- a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik;
- b. Pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi Kompetensi Teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi kompetensi dan wawancara dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi kompetensi dan wawancara diumumkan;
- d. Sanggah diajukan melalui SSCASN;
- e. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- f. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- g. Dalam hal kesalahan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi berhak untuk menolak sanggahan;
- h. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing-masing jabatan

dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- i. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN berikutnya.
- j. PPK menetapkan Keputusan Pengangkatan PPPK yang dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja PPPK;

## **VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

Masa hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2024 paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

## **VII. KETENTUAN LAIN**

1. Seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 wajib menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dan wawancara dilaksanakan di Laboratorium CAT Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara di Kantor Bupati Bulungan jalan Jelarai Tanjung Selor;
3. Pihak Pemerintah Kab/Kota tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panselda Pengadaan ASN Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Tahun Anggaran 2024;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan memberikan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta adalah prestasi dari peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain, dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan pungutan, tawaran berupa apapun serta tindakan lainnya yang bertujuan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CASN Tahun 2024 hanya dapat dilihat pada situs *online* Portal SSCASN BKN dan website <https://bkpsdm.bulungan.go.id/>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](#);
7. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat waktu dan tempat pelaksanaan ujian atau pengumuman penting lainnya;
8. Apabila dikemudian hari diketahui pelamar memberikan keterangan dan/atau data yang tidak benar baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK dan PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon PPPK dan PPPK, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan, maka Panitia dapat mengusulkan penggantinya kepada Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
11. Keputusan Tim Panselda Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2024 <http://sscasn.bkn.go.id> dan website <https://bkpsdm.bulungan.go.id>, media sosial IG & FB BKPSDM : [Bkpsdmbulungan](#);
13. Pemberian penghasilan, khususnya Tunjangan Daerah kepada pelamar yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Tunjangan Daerah;
14. Ketentuan lainnya dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
  - 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
  - 2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2024;
  - 3) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran di Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
  - 4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2024;
  - 5) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
  - 6) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;

**VIII. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 bagi Pelamar Prioritas) Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidikan Tahun 2024), Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) Dan Tenaga Non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN.**

No.	Kegiatan	Jadwal
-----	----------	--------

1	Pengumuman Seleksi	30 September s/d 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s/d 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s/d 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s/d 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s/d 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s/d 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Sanggah (*)	5 s/d 11 November 2024
8	Penarikan Data Final	12 s/d 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s/d 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s/d 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s/d 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s/d 23 Desember 2024
13	Pengumuman Kelulusan (**)	24 s/d 31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s/d 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s/d 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s/d 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s/d 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s/d 28 Februari 2025

**IX. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 Bagi Tenaga Non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (termasuk Lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah)**

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s/d 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s/d 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember s/d 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s/d 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s/d 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s/d 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Sanggah (*)	22 s/d 28 Februari 2025

8	Penarikan Data Final	1 s/d 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s/d 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s/d 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s/d 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s/d 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s/d 21 Mei 2025
14	Pengumuman Kelulusan (**)	22 s/d 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s/d 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s/d 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s/d 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s/d 31 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s/d 31 Juli 2025

**Keterangan :**

- (\*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024  
(\*\*) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan  
(\*\*\*) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

Tanjung Selor, 30 September 2024

Pjs. BUPATI BULUNGAN,  
  
**H. HAERUMUDDIN, S.H, M.AP**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 800.1.2.2/2403/BKPSDM-IV  
TENTANG SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALOKASI PPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>A.</b>	<b>GURU</b>		
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS - SD	293	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS - TK	8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

15	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
16	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>TOTAL</b>		<b>499</b>	



RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
<b>B.</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>		
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS TANAH KUNING
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
4	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS SALIMBATU
5	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ANTUTAN
6	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUNYU
7	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS LONG BELUAH
8	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS
9	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
10	APOTEKER AHLI PERTAMA	2	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
11	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
12	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	UPTD INSTALASI FARMASI DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN
13	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	9	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
14	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
15	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS LONG BANG
16	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUNYU
17	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
18	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
19	BIDAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS PIMPING
20	BIDAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ANTUTAN
21	BIDAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS TANAH KUNING   PUSTU WONOMULYO
22	BIDAN TERAMPIL	3	PUSKESMAS SEKATAK BUJI

23	BIDAN TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS PIMPING   PUSTU PANCA AGUNG
24	BIDAN TERAMPIL	9	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
25	BIDAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS LONG BANG   PUSTU LONG LEMBU
26	BIDAN TERAMPIL	4	UPT PUSKESMAS PIMPING
27	BIDAN TERAMPIL	4	PUSKESMAS TANAH KUNING
28	BIDAN TERAMPIL	2	PUSKESMAS LONG BIA
29	BIDAN TERAMPIL	3	PUSKESMAS ANTUTAN
30	BIDAN TERAMPIL	9	UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS
31	BIDAN TERAMPIL	8	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
32	BIDAN TERAMPIL	6	PUSKESMAS SALIMBATU
33	BIDAN TERAMPIL	1	PUSKESMAS LONG BELUAH
34	BIDAN TERAMPIL	18	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
35	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	UPT PUSKESMAS PIMPING
40	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS
41	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ANTUTAN
42	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
43	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS SALIMBATU
44	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ANTUTAN
45	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS PIMPING
46	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
47	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
48	PERAWAT AHLI PERTAMA	11	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
49	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU

50	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
51	PERAWAT TERAMPIL	1	PUSKESMAS LONG BIA   PUSTU LONG LEJUH
52	PERAWAT TERAMPIL	2	PUSKESMAS LONG BANG
53	PERAWAT TERAMPIL	2	PUSKESMAS TANAH KUNING
54	PERAWAT TERAMPIL	21	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
55	PERAWAT TERAMPIL	1	PUSKESMAS LONG BANG   PUSTU LONG TELENJAU
56	PERAWAT TERAMPIL	4	PUSKESMAS SALIMBATU
57	PERAWAT TERAMPIL	4	PUSKESMAS LONG BELUAH
58	PERAWAT TERAMPIL	4	UPT PUSKESMAS PIMPING
59	PERAWAT TERAMPIL	2	UPT PUSKESMAS BUNYU
60	PERAWAT TERAMPIL	3	PUSKESMAS LONG BIA
61	PERAWAT TERAMPIL	15	UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS
62	PERAWAT TERAMPIL	6	PUSKESMAS ANTUTAN
63	PERAWAT TERAMPIL	2	PUSKESMAS SEKATAK BUJI
64	PERAWAT TERAMPIL	4	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
65	PERAWAT TERAMPIL	91	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
66	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS PIMPING
67	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
68	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
69	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	1	UPTD INSTALASI FARMASI DAN PENGUJIAN FASILITAS KESEHATAN
70	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS LONG BELUAH
71	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	UPT PUSKESMAS BUNYU
72	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS SALIMBATU
73	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
74	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS ANTUTAN
75	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	2	UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS

76	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
77	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS SEKATAK BUJI
78	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU
79	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PUSKESMAS SALIMBATU
80	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	2	UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR
81	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
82	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS
<b>TOTAL</b>		<b>314</b>	

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>ALOKASI PPPK</b>	<b>UNIT PENEMPATAN</b>
<b>C.</b>	<b>TENAGA TEKNIS</b>			
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 PARIWISATA / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL	1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA   BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM
3	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM
4	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN / S-1 REKAYASA KESELAMATAN / S-1 KIMIA / S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK / S-1 MANAJEMEN BENCANA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK MESIN	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN
5	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
7	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS PERIKANAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
8	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
9	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN JASMANI	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

10	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMPUTER / D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL / D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI	1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
12	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
14	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN JASMANI / S-1 KIMIA / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
16	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
17	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN FISIKA	1	DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

21	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
22	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   SUB BIDANG PELAYANAN, PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
23	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
24	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
25	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
26	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG BINA MARGA
27	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA
28	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN   SEKSI ANGKUTAN
29	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	6	DINAS PERIKANAN   UPTD BALAI BENIH IKAN
30	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	DINAS PERTANIAN   UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN   SUB BAGIAN TATA USAHA
31	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH   SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
32	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	8	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM

33	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM
34	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	3	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG KLINIK
35	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT	5	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG NON KLINIK
36	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / PERSAMAAN SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 004 BUNYU
37	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LONG BANG
38	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN
39	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN	1	DINAS PERIKANAN   BIDANG PENGUATAN DAYA SAING DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
40	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MATEMATIKA / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 SASRA INGGRIS	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PENANAMAN MODAL
41	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 HUKUM	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI
42	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TARBIYAH / S-1 AGAMA	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
43	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTARI NEGERA / S-1 ILMU SOSIAL POLITIK / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
44	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM



45	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 HUKUM	3	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
46	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 MANAJEMEN	2	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN   SUB BAGIAN PROTOKOL
47	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MATEMATIKA / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
48	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK SIPIL	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
49	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI	2	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN KEUANGAN
50	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL DAN POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM
51	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN
52	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGERA / S-1 EKONOMI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
53	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
54	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV/S-1 EKONOMI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 AKUNTANSI / D-IV KEUANGAN / S-1 KEUANGAN	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
55	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGERA / S-1 ILMU HUKUM	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN KINERJA APARATUR

56	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN
57	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   SUB BIDANG PELAYANAN, PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
58	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH   SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN KEBERATAN
59	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH   SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
60	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 AKUNTANSI	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT
61	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
62	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
63	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
64	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
65	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

66	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
67	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN   SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
68	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG KESATUAN BANGSA   SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA ,AGAMA
69	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PERPUSTAKAAN
70	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
71	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 EKONOMI DAN MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
72	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
73	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
74	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN KEUANGAN
75	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERTANIAN	1	DINAS KETAHANAN PANGAN   BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
76	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 MATEMATIKA	2	DINAS KETAHANAN PANGAN   BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
77	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS KETAHANAN PANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

78	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
79	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
80	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTARASI	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT
81	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU KIMIA / S-1 KIMIA	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP   SUB BAGIAN TATA USAHA
82	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
83	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 KOMPUTER	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
84	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ARSITEKTUR	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENATAAN DAN PENAAATAN PPLH
85	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KEHUTANAN / D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
86	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 INFORMATIKA	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
87	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 INFORMATIKA	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
88	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK MESIN	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG BINA MARGA
89	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA

90	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
91	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN JASMANI DAN REKREASI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN / S-1 TARBIYAH / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI BISNIS / S-1 KEHUTANAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 ARGOTEKNOLOGI / S-1 TEKNIK PROSESING / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (S-1 PLANOLOGI) / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
92	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
93	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
94	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERTANIAN	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
95	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
96	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
97	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

				DAN TUMBUH KEMBANG ANAK
98	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 FARMASI	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKKAN
99	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 KOMPUTER	2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
100	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN	1	DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN   SEKSI ANGKUTAN
101	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERIKANAN / D-IV/S-1 EKONOMI	1	DINAS PERIKANAN   UPTD BALAI BENIH IKAN
102	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM	1	DINAS PERIKANAN   BIDANG PENGUATAN DAYA SAING DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
103	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERIKANAN TANGKAP / S-1 PERIKANAN BUDIDAYA / S-1 PERIKANAN / S-1 PERIKANAN BIDANG AQUAKULTURE	1	DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP
104	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PENDIDIKAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	6	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
105	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERDAGANGAN
106	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	3	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
107	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO

108	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   UPTD PASAR   SUB BAGIAN TATA USAHA
109	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI	1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
110	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG PERKEBUNAN
111	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	DINAS PERTANIAN   UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN   SUB BAGIAN TATA USAHA
112	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MATEMATIKA	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
113	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAGEMENT	1	DINAS PERTANIAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
114	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PETERNAKAN / S-1 PETERNAKAN PRODUKSI TERNAK / S-1 PETERNAKAN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN / S-1 PAKAN TERNAK	2	DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
115	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
116	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
117	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ARSITEKTUR	3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
118	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

119	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SAstra INDONESIA / S-1 PENDIDIKAN PPKN / S-1 HUKUM / S-1 SAINS FISIKA / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	13	DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
120	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
121	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV/S-1 MANAJEMEN	2	INSPEKTORAT   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
122	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	INSPEKTORAT   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
123	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI KERJASAMA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
124	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH   SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
125	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 TEKNIK SIPIL	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN   SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA & PENYULUHAN KEBAKARAN
126	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN
127	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI MANAJEMEN PUBLIK / D-IV/S-1 EKONOMI	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



128	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
129	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI MANAJEMEN PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 HUKUM PEMERINTAHAN / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU SOSIATRI / S-1 HUKUM / S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN / S-1 PENDIDIKAN PELATIHAN DAN OLAHRAGA / S-1 ARSITEKTUR	18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
130	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   KANTOR LURAH TANJUNG SELOR TIMUR   SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
131	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SOSIAL DAN POLITIK	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   KANTOR LURAH TANJUNG SELOR TIMUR   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
132	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   KANTOR LURAH TANJUNG SELOR HILIR   SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
133	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   KANTOR LURAH TANJUNG SELOR HULU   SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
134	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
135	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
136	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 SISTEM INFORMASI	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
137	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   KANTOR LURAH TANJUNG PALAS TENGAH   SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
138	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   KANTOR LURAH TANJUNG PALAS HULU   SEKRETARIAT

139	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ADMINISTRASI NEGERA	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   KANTOR LURAH TANJUNG PALAS HULU   SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
140	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS BARAT   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
141	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS BARAT   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN
142	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS BARAT   SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
143	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS UTARA   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
144	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS UTARA   SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
145	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 PERTANIAN	1	KANTOR CAMAT PESO   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
146	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUTANSI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
147	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI UMUM	3	DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
148	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 PSIKOLOGI UMUM	2	DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
149	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SISTEM INFORMASI	2	DINAS KESEHATAN   BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
150	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI	1	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TANJUNG SELOR   SUB BAGIAN TATA USAHA
151	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUMI RAHAYU   SUB BAGIAN TATA USAHA
152	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN	1	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUNYU   SUB BAGIAN TATA USAHA

153	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS ANTUTAN
154	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 KOMPUTER / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SALIMBATU
155	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 FARMASI	2	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS   SUB BAGIAN TATA USAHA
156	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN / S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	2	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PIMPING   SUB BAGIAN TATA USAHA
157	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	2	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SEKATAK BUJI
158	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	2	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANAH KUNING
159	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LONG BIA
160	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LONG BELUAH
161	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KOMPUTER / S-1 EKONOMI AKUNTANSI / S-1 KESEHATAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 EKONOMI	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LONG BANG
162	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 FARMASI	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG KLINIK
163	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KOMPUTER	2	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG NON KLINIK

164	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 KEPERAWATAN	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PELAYANAN   SEKSI KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
165	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUTANSI / S-1 EKONOMI	4	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN MEDIS
166	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI	3	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN KEUANGAN
167	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
168	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MATEMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV/S-1 MANAJEMEN	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT
169	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR   SEKSI PESERTA DIDIK & PEMBANGUNAN KARAKTER
170	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR   SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
171	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV/S-1 MANAJEMEN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
172	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PAUD & PENDIDIKAN NON FORMAL   SEKSI PESERTA DIDIK & PEMBANGUNAN KARAKTER
173	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PAUD & PENDIDIKAN NON FORMAL   SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA
174	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 MANAJEMEN PERUSAHAAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PAUD & PENDIDIKAN NON FORMAL

175	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN   SEKSI PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
176	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 MANAJEMEN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN
177	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 020 TANJUNG SELOR
178	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 014 TANJUNG SELOR
179	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 010 TANJUNG SELOR
180	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 TANJUNG SELOR
181	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 005 TANJUNG SELOR
182	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 TANJUNG SELOR
183	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 TANJUNG SELOR

184	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 SEKATAK
185	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 BUNYU
186	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 BUNYU
187	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 005 BUNYU
188	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 007 TANJUNG PALAS TIMUR
189	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 7 TANJUNG SELOR
190	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV/S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 3 TANJUNG SELOR
191	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV/S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 2 TANJUNG SELOR
192	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV/S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 1 TANJUNG SELOR
193	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	D-IV/S-1 EKONOMI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 1 SEKATAK
194	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV/S-1 AKUNTANSI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 1 BUNYU
195	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV/S-1 AKUNTANSI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 4 TANJUNG PALAS TIMUR

196	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV/S-1 AKUNTANSI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV/S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 MANAJEMEN EKONOMI	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 3 TANJUNG PALAS TIMUR
197	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
198	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN ORGANISASI
199	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
200	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	3	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
201	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
202	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
203	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN   SUB BAGIAN PROTOKOL
204	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
205	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN PEMERINTAHAN
206	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN KEUANGAN
207	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM   SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

208	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM
209	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
210	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKRETARIAT
211	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
212	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
213	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   SUB BIDANG PELAYANAN, PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN
214	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
215	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMK BISNIS DAN MANAJEMEN	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH   SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA PENDAPATAN
216	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN   SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
217	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH   SUB BIDANG AKUNTANSI I
218	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   BIDANG KESATUAN BANGSA   SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK



219	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
220	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN   BIDANG PERPUSTAKAAN
221	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
222	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
223	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
224	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
225	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA UMUM / SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KETAHANAN PANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
226	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN   BIDANG PERSANDIAN
227	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
228	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
229	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
230	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
231	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

232	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   SEKRETARIAT
233	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
234	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN   SEKSI PEMADUAN MODA, TEKNOLOGI DAN LINGKUNGAN PERHUBUNGAN
235	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERHUBUNGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
236	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERHUBUNGAN   BIDANG PRASARANA   SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA
237	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERIKANAN   BIDANG PENGUATAN DAYA SAING DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
238	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERIKANAN   SEKRETARIAT
239	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
240	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PERTANIAN   SEKRETARIAT
241	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SMK PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
242	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	12	DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
243	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

244	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
245	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
246	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	INSPEKTORAT   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
247	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	INSPEKTORAT   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
248	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG SUMBER DAYA APARATUR   SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL
249	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
250	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
251	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN   SEKSI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA & PENYULUHAN KEBAKARAN
252	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG SUMBER DAYA APARATUR   SEKSI PELATIHAN DASAR
253	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
254	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   KANTOR LURAH TANJUNG SELOR HILIR   SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

255	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   KANTOR LURAH TANJUNG SELOR HILIR   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
256	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG SELOR   KANTOR LURAH TANJUNG SELOR HULU   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
257	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
258	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
259	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
260	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
261	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   KANTOR LURAH TANJUNG PALAS TENGAH   SEKRETARIAT
262	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   KANTOR LURAH TANJUNG PALAS HILIR   SEKRETARIAT
263	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS   KANTOR LURAH KARANG ANYAR   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
264	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS TIMUR   SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN
265	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS UTARA   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
266	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS TENGAH   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
267	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS BARAT   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

268	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS BARAT   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
269	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT PESO   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
270	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT PESO HILIR   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN
271	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT SEKATAK   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
272	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT SEKATAK   SEKSI SOSIAL, EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
273	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT SEKATAK   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
274	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT BUNYU   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
275	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	KANTOR CAMAT BUNYU   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
276	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS KESEHATAN   BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
277	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN
278	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
279	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LONG BANG
280	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS BUNYU   SUB BAGIAN TATA USAHA
281	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KESEHATAN   UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH   SUB BAGIAN TATA USAHA

282	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS ANTUTAN
283	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS PIMPING   SUB BAGIAN TATA USAHA
284	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SALIMBATU
285	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS SEKATAK BUJI
286	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS TANAH KUNING
287	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LONG BIA
288	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / SLTA	1	DINAS KESEHATAN   UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS   SUB BAGIAN TATA USAHA
289	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	10	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG KLINIK
290	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	3	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
291	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	7	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN KEUANGAN
292	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PENGEMBANGAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT   SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
293	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN PERENCANAAN

294	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	2	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PELAYANAN   SEKSI KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN
295	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / SLTA KEJURUAN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR   SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
296	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
297	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
298	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
299	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT
300	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 TANJUNG SELOR
301	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 TANJUNG SELOR
302	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 003 TANJUNG SELOR
303	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 004 TANJUNG SELOR
304	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 TANJUNG SELOR
305	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 008 TANJUNG SELOR
306	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 009 TANJUNG SELOR

307	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 010 TANJUNG SELOR
308	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 012 TANJUNG SELOR
309	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 015 TANJUNG SELOR
310	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 016 TANJUNG SELOR
311	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 020 TANJUNG SELOR
312	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 021 TANJUNG SELOR
313	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 022 TANJUNG SELOR
314	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 025 TANJUNG SELOR
315	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA KEJURUAN / SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 027 TANJUNG SELOR
316	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 028 TANJUNG SELOR
317	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 TANJUNG PALAS
318	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 003 TANJUNG PALAS
319	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 004 TANJUNG PALAS
320	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 005 TANJUNG PALAS



321	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 TANJUNG PALAS
322	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 007 TANJUNG PALAS
323	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 008 TANJUNG PALAS
324	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS
325	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 010 TANJUNG PALAS
326	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 013 TANJUNG PALAS
327	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 TANJUNG PALAS BARAT
328	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 TANJUNG PALAS BARAT
329	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 TANJUNG PALAS BARAT
330	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 TANJUNG PALAS TIMUR
331	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 TANJUNG PALAS TIMUR
332	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 003 TANJUNG PALAS TIMUR
333	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 004 TANJUNG PALAS TIMUR
334	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 005 TANJUNG PALAS TIMUR

335	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 007 TANJUNG PALAS TIMUR
336	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 008 TANJUNG PALAS TIMUR
337	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS TIMUR
338	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 010 TANJUNG PALAS TIMUR
339	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 013 TANJUNG PALAS TIMUR
340	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 TANJUNG PALAS UTARA
341	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 TANJUNG PALAS UTARA
342	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 007 TANJUNG PALAS UTARA
343	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 008 TANJUNG PALAS UTARA
344	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 009 TANJUNG PALAS UTARA
345	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 010 TANJUNG PALAS UTARA
346	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 TANJUNG PALAS TENGAH
347	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 TANJUNG PALAS TENGAH
348	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 007 TANJUNG PALAS TENGAH

349	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 008 TANJUNG PALAS TENGAH
350	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 014 TANJUNG PALAS TENGAH
351	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 SEKATAK
352	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 SEKATAK
353	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 003 SEKATAK
354	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 004 SEKATAK
355	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 005 SEKATAK
356	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 SEKATAK
357	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 008 SEKATAK
358	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 011 SEKATAK
359	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / SLTA KEJURUAN	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 012 SEKATAK
360	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 BUNYU
361	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 002 BUNYU
362	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 003 BUNYU

363	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 005 BUNYU
364	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 BUNYU
365	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 PESO
366	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 006 PESO
367	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA SEDERAJAT	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 001 PESO HILIR
368	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 003 PESO HILIR
369	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SD NEGERI 004 PESO HILIR
370	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 2 TANJUNG SELOR
371	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 3 TANJUNG SELOR
372	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 5 TANJUNG SELOR
373	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 7 TANJUNG SELOR
374	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 8 TANJUNG SELOR
375	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 1 TANJUNG PALAS
376	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 2 TANJUNG PALAS TIMUR

377	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 5 TANJUNG PALAS TIMUR
378	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 6 TANJUNG PALAS TIMUR
379	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 3 TANJUNG PALAS UTARA
380	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 1 BUNYU
381	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 2 BUNYU
382	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 1 SEKATAK
383	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 2 SATAP SEKATAK
384	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 2 SEKATAK
385	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 1 PESO
386	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PETERNAKAN	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
387	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROTEKNOLOGI	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
388	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG PERKEBUNAN
389	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PETERNAKAN	1	DINAS PERTANIAN   BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
390	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH   SUB BIDANG PERBENDAHARAAN

391	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	DINAS KETAHANAN PANGAN   SEKRETARIAT
392	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK INDUSTRI	2	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   BIDANG PERINDUSTRIAN
393	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI NIAGA / D-III TEKNIK MESIN	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA
394	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK ARSITEKTUR	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA RUANG
395	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI / D-III/A-III TEKNIK ARSITEKTUR	2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
396	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR   SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR
397	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SEKRETARIAT
398	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	DINAS PERIKANAN   SEKRETARIAT
399	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III ADMINISTRASI BISNIS	1	DINAS SOSIAL   SEKRETARIAT
400	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA / D-III KOMPUTER	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN UMUM
401	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III KEPARIWISATAAN	1	SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM
402	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III AKUNTANSI	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN KEUANGAN
403	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BAGIAN TATA USAHA   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

404	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS LONG BELUAH
405	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 AGRIBISNIS	3	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
406	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN JASA KONTRUKSI
407	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA   BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
408	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	1	SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN ADMINISTRASI UMUM   BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
409	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PERSAMAAN SLTP (PAKET B)	1	BADAN PENDAPATAN DAERAH   BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH   SUB BIDANG PEMERIKSAAN DAN KEBERATAN
410	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	1	UPTD RSD DR. H. SOEMARNO SOSROATMODJO   BIDANG PENUNJANG   SEKSI PENUNJANG KLINIK
411	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	DINAS SOSIAL   BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
412	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP	1	DINAS PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP
413	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP/SMP SEDERAJAT	20	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
414	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SD/SEDERAJAT	9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
415	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SLTP UMUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

416	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	SMP	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   SMP NEGERI 2 TANJUNG SELOR
417	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBANGUNAN DESA
418	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA   BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
419	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS TIMUR   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
420	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PERIKANAN	1	KANTOR CAMAT TANJUNG PALAS UTARA   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN
421	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROEKOTEKNOLOGI / S-1 ILMU TANAH / S-1 ILMU EKONOMI PERTANIAN	8	DINAS PERTANIAN   UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
422	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI	1	DINAS SOSIAL   BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL
423	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
424	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   SEKRETARIAT   SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
425	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
426	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
427	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



428	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
429	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) / SLTA/SMA SEDERAJAT	14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
430	PRANATA TRANTIBUM	SLTA/SMA SEDERAJAT / PERSAMAAN SLTA (PAKET C)	134	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT   SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
<b>TOTAL</b>			<b>876</b>	

Tanjung Selor, 30 September 2024

Pjs. BUPATI BULUNGAN,



**H. HAERUMUDDIN, S.H, M.AP**